Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 8, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Kompleksitas Kepentingan Turki dalam Isu Uyghur: Kesamaan Budaya dan Pertimbangan Ekonomi

Adlan Almilzan Athori
OIC Youth Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli, 2025
Revised Juli, 2025
Accepted Juli, 2025
Available online Juli , 2025

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Uyghur merupakan salah satu isu yang sedang eksis di dunia, isu uyghur ini merupakan isu pembersihan etnis yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap kelompok minoritas Uyghur yang menduduki wilayah Xinjiang. Etnis Uyghur memiliki keterikatan budaya yang kuat terhadap Turki, yakni persamaan sejarah, bahasa, dan agama. Etnis Uyghur telah menghadapi penindasan China sejak 1940-an, China melakukan tindakan-tindakan represif terhadap etnis Uyghur seperti pembatasan agama dan budaya, kerja paksa, sterilisasi terhadap perempuan uyghur, hingga penahanan massal yang telah dilakukan pada tahun 2017. Tindakan represif yang dilakukan oleh China terhadap etnis Uyghur memicu respons yang variatif dari masyarakat internasional. Turki sebagai negara yang memiliki keterikatan budaya dengan etnis Uyghur, memberikan respon yang cenderung moderat. Sebab, Turki memiliki hubungan diplomatik yang cukup erat dengan China. Turki dinilai sangat berhati-hati dalam memberikan respon terhadap isu Uyghur, Turki telah memberikan respon verbal dan non-verbal terhadap isu Uyghur, seperti seruan aksi dan demonstrasi, membuka pintu untuk pengungsi Uyghur, hingga memberikan kritik serta kecaman kepada pemerintah China, atas apa yang telah mereka lakukan terhadap isu Uyghur.

Kata Kunci*:* Uyghur, China, Turki, Respon

ABSTRACT

Uyghur is one of the issues currently existing in the world, this Uyghur issue is an ethnic cleansing issue carried out by the Chinese government against the Uyghur minority group residing in the Xinjiang region. The Uyghur ethnic group has a strong cultural connection to Turkey, including shared history, language, and religion. The Uyghur ethnic group has faced oppression from China since the 1949s, with China taking repressive actions against the Uyghur ethnic group such as restricting religion and culture, forced labor, sterilization of Uyghur women, and mass detentions carried out in 2017. The repressive actions taken by China against the Uyghur ethnic group have triggered varied responses from the international community. Turkey, as a country with cultural ties to the Uyghur ethnic group, has responded in a relatively moderate manner. Because Turkey has a fairly close diplomatic relationship with China. Turkey is considered very cautious in responding to the Uyghur issue. Turkey has provided both verbal and non-verbal responses to the Uyghur issue, such as calls for action and demonstrations, opening its doors to Uyghur refugees, and criticizing and condemning the Chinese government for what they have done regarding the Uyghur issue.

Keywords: Turkey, Uyghur, China, Response

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak setiap individu yang telah melekat sejak lahir, hak tersebut meliputi hak hidup, kebebasan, serta memiliki rasa yang aman. Oleh karena itu, HAM harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. HAM juga

*Corresponding author
E-mail addresses: adlanelathori51@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 8 No 6, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

menjadi pertimbangan awal setiap negara dalam membentuk hukum, peraturan, ataupun sebuah sistem pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menjaga serta melindungi harkat serta martabat antar manusia. Pelanggaran HAM merupakan permasalahan serius yang harus diatasai dengan bijak, meskipun saat ini pelanggaran HAM tersebut telah dibedakan menjadi beberapa bagian antara lain pelanggaran HAM biasa dan berat. Pelanggaran HAM dapat memicu konflik yang lebih besar, dan memberikan dampak yang serius terhadap korban bahkan masyarakat luas.

Meskipun termasuk dalam kategori permasalahan serius serta dapat memberikan dampak yang luas, pelanggaran HAM kerap terjadi di beberapa belahan dunia. Salah satunya di Asia Tengah, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis minoritas uyghur di Xinjiang. Pelanggaran HAM atas etnis Uyghur ini meliputi pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berbudaya, kebebasan untuk mendapatkan pendidikan serta pekerjaan, bahkan kebebasan untuk hidup dan memiliki keturunan. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh China terhadap etnis Uyghur telah mengundang respon yang beragam dari masyarakat internasional, terlebih China merupakan negara super power. Sehingga, isu Uyghur menjadi permasalahan yang kompleks, tidak hanya sebatas pelanggaran HAM, akan tetapi telah meluas menjadi persoalan geopolitik, pertaruangan narasi, serta perekonomian global.

Keberadaan etnis Uyghur di wilayah Xinjiang, yang merupakan wilayah dengan letak geografis yang strategis, serta kekayaan alam yang melimpah, membuat China sangat protektif terhadap wilayah ini. Wilayah Xinjiang termasuk kedalam rencana proyek global China yang disebut sebagai Belt and Road Initiative (BRI). Terlebih, wilayah yang strategis ini diduduki oleh etnis yang bukan dari bagian mereka. Hal ini, memicu kekhawatiran China terhadap adanya tindakan separatisme dan ekstremisme yang dapat mempengaruhi kedaulatan negara tersebut.

Etnis Uyghur termasuk kedalam etnis Turkik yang sebagian besarnya memeluk agama islam, memiliki rumpun etnis yang sama dengan negara-negara Asia Tengah lainnya seperti Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgizstan, dan Kazakshtan. Selain itu, sebagai bagian dari etnis Turkik, Uyghur juga memiliki banyak persamaan dengan Turki baik persamaan secara agama, hingga persamaan bahasa dan budaya. Didasari dengan adanya persamaan budaya tersebut, membuat Turki bergerak untuk menyuarakan hak-hak dan memberikan dukungan terhadap etnis Uyghur di Xinjiang. Akan tetapi, Turki juga memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi dengan China. Hal ini, membuat Turki sangat berhati-hati dalam mengambil sikap terkait isu Uyghhur, guna menyeimbangi antara keterikatan budaya dengan Uyghur dan hubungan diplomatik serta ekonomi dengan China yang menjadi mitra dagang ketiga terbesar bagi Turki.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, deskriptif analisis. Riset ini akan membahas lebih dalam mengenai riset-riset terdahulu, dokumen-dokumen, serta data konkret yang berkaitan dengan riset ini. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis data-data yang didapatkan yakni teori konstruktivisme yang digunakan untuk menganalisis solidaritas Turki terhadap etnis Uyghur. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan teori realisme neoklasik yang digunakan untuk menganalisis ambiguitas kebijakan Turki dalam menganggapi isu Uyghur guna mempertahankan hubungan diplomatik serta ekonomi dengan China.

PEMBAHASAN

Solidaritas Turki terhadap Uyghur: Ikatan Sejarah dan Budaya

Turki dan Uyghur memiliki rumpun bangsa yang sama, yakni rumpun bangsa Turkik yang berasal dari Asia Tengah, kesamaan akar etnis, bahasa, budaya, serta agama membuat Turki dan Uyghur saling terikat. Bangsa Turkik sendiri berasal dari wilayah pegunungan Altai, Mongolia

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 8, Number 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Barat, awalnya bangsa ini hidup sebagai pengembala yang nomaden. Proto-Turkik menjadi leluhur atau nenek moyang dari bangsa Turkik seperti Uyghur, Turki, Uzbek, Kazak, dan lainnya. Proto-Turkik merupakan persatuan suku-suku besar di Asia Tengah dan Mongolia, Proto-Turkik yang saat itu didominasi oleh Xiongnu dan Han. Meskipun belum membentuk identitas Turkik, Proto-Turkik telah aktif secara militer serta pengembangan budaya hal tersebut merupakan awal terbentuknya identitas Turkik.

Ikatan sejarah tersebut membangun solidaritas antara Turki dan Uyghur, lahir dari nenek moyang yang sama, serta agama yang sama. Membuat Turki tergerak untuk menyuarakan hak-hak asasi etnis Uyghur yang ditindas oleh Pemerintah China. Meskipun penindasan yang dilakukan oleh China terhadap etnis Uyghur telah dilakukan sejak tahun 1940-an, pemerintah Turki baru memberikan dukungan pada tahun 1980-an dengan memberikan dukungan yang tidak eksplisit terhadap etnis Uyghur dengan memberikan izin diaspora Uyghur untuk mendirikan organisasi budaya dan politik Uyghur di Turki. Dukungan sistematis Turki terhadap etnis Uyghur baru dimulai pada tahun 2009, dimulai dari Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam keras atas tindakan China terhadap etnis Uyghur di Xinjiang dan mengatakan bahwa pembantaian terhadap etnis Uyghur merupakan “genosida”.

Saat itu terjadi kerusuhan etnis di Urumqi, Xinjiang antara etnis Uyghur dan Han yang telah menewaskan ratusan orang. Kerusuhan ini juga menjadi titik awal eskalasi isu Uyghur di masyarakat internasional, pemicu kecaman Turki atas kerusuhan ini adalah sikap diskriminasi pemerintah China terhadap etnis Uyghur. Pemerintah China, saat itu menahan lebih dari 1.000 orang Uyghur dengan alasan penyerangan Uyghur atas etnis Han, yang sebenarnya saat itu kerusuhan disebabkan oleh etnis Han yang membunuh pekerja Uyghur terlebih dahulu. Lebih dari itu, titik awal kerusuhan adalah dengan adanya imigrasi etnis Han yang dikerahkan oleh Pemerintah China dan adanya diskriminasi secara ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah China terhadap etnis Uyghur dan Han.

Setelah kerusuhan tersebut, Turki memberikan dukungan secara terbuka terhadap etnis uyghur, selain memberikan kecaman, Turki juga menyerukan agar adanya intervensi internasional terhadap isu Uyghur, dan mendesak PBB serta negara-negara Islam untuk bersuara. Saat itu, menjadi awal media turki dan diaspora Uyghur aktif menyuarakan isu Uyghur di Xinjiang. Pada 2014, Pemerintah China menerapkan kebijakan represif penahanan massal terhadap etnis Uyghur di Xinjiang. Namun, pemerintah Turki tidak memberikan dukungan secara resmi terhadap etnis Uyghur. Pada tahun tersebut, pemerintah Turki dinilai lebih hati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan yang menyangkut China, sebab pada tahun ini Turki sedang menjaga hubungan baik dengan China, karena Turki sedang mengembangkan kerja sama ekonomi dengan China. Kemudian, larangan berpuasa yang dilakukan oleh China terhadap Uyghur pada tahun 2015, kembali membangunkan amarah masyarakat Turki terhadap China. Turki kembali memberikan kecaman terhadap larangan berpuasa di Xinjiang, dan menyebut itu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis Uyghur, hal terebut disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Turki.

Pada tahun 2016, Turki sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan untuk menyuarakan isu Uyghur. Meskipun, pada tahun ini pemerintah China sedang melakukan perluasan kamp-kamp penahanan massal untuk etnis Uyghur. Akan tetapi, Turki masih memberikan ruang untuk diaspora komunitas Uyghur di Turki untuk menyuarakan solidaritas mereka, dan membiarkan media-media Turki tetap diberi ruang untuk menyoroti kondisi etnis Uyghur di Xinjiang saat itu. Sikap diam Turki bertahan hingga tahun 2019, meskipun terdapat

*Corresponding author
E-mail addresses: adlanelathori51@gmail.com

laporan beberapa laporan dari Organisasi HAM dan PBB terkait pelanggaran HAM yang terjadi di China dalam kurun waktu tersebut.

Setelah beberapa tahun memilih untuk diam, pemerintah Turki kembali bersuara terkait isu Uyghur dan memberikan pernyataan resmi terkait kecamannya atas kamp-kamp penahanan massal di Xinjiang pada tahun 2019. Turki mengecam China atas pelanggaran HAM dengan menahan etnis Uyghur di penahanan massal, dan meminta China untuk segera menutup kamp-kamp penahanan massal tersebut, serta menghormati hak asasi dan kebebasan beragama etnis Uyghur. Selain itu, masyarakat Turki juga turut menekan pemerintah China melalui demonstrasi solidartas terhadap Uyghur secara besar-besaran di berbagai kota di Turki dan media konservatif maupun nasionalis di Turki sering menyoroti pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah China, dan secara kompak membangun narasi bahwa China ingin memusnahkan identitas muslim Turkik.

Sedangkan pada tahun 2020-2021, pemerintah Turki mendapatkan tekanan dari China maupun pengungsi Uyghur terkait perjanjian ekstradisi, pemerintah Turki belum meratifikasi perjanjian tersebut secara legal di parlemen dan pemerintah Turki juga menegaskan bahwa tidak akan mengorbankan pengungsi Uyghur. Sehingga, pada tahun ini pemerintah Turki menegaskan bahwa tidak akan melaksanakan ekstradisi terhadap etnis Uyghur dan pemerintah Turki memilih diam dan tidak memberikan kecaman secara resmi terhadap pelanggaran HAM di Xinjiang. Lalu pada tahun 2022- hingga saat ini, pemerintah Turki dianggap lebih berhati-hati dalam menyuarakan isu Uyghur meskipun pada saat pemilihan umum beberapa partai islamis Turki membangun narasi bahwa Uyghur merupakan symbol solidaritas Islam dan bangsa Turkik. Pada Tahun ini, pemerintah tidak memberikan tindakan resmi apapun terkait isu Uyghur. Namun, masyarakat Turki terys aktif dalam memberikan dukungan terhadap Uyghur melalui berbagai kegiatan seperti aksi, seminar, dan beberapa kegiatan lainnya.

Berdasarkan dengan teori konstruktivisme, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Turki terhadap etnis Uyghur terbagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah dengan sikap non-verbal yakni mengizinkan masuk para pengungsi Uyghur ke Turki serta memberikan perlindungan dan kebebasan diaspora Uyghur untuk menyuarakan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap etnis minoritas Uyghur di Xinjiang. Adapun sikap verbal yang dilakukan oleh Turki yakni dengan memberikan kecaman atas pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang dan mendesak pemerintah China untuk menghentikan pelanggaran HAM tersebut serta menutup kamp-kamp penahanan massal. Selain itu, melalui media nasional Turki terus menyoroti aktifitas di Xinjiang, membangun narasi terkait kamp-kamp penahanan massal serta tindakan represif lainnya yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis minoritas Uyghur

Hubungan Diplomatik Turki-China: Dilema kerja sama strategis dan kemanusiaan

Hubungan diplomatik antara Republik Turki dengan China telah terjalin jauh sebelum abad ke-20 M, kedua negara tersebut memiliki sejarah panjanag sebelum keduanya kini menjadi negara modern. Nenek moyang bangsa Turkik yang berasal dari proto Turkik kemudian mendeklarasikan diri sebagai bangsa Turkik telah menjalin hubungan dagang dan politik dengan China sejak abad ke-6 M, kepada kekaisaran di China seperti Dinasti Tang dan Han. Hubungan antara nenek moyang bangsa Turkik dengan kekaisaran-kekaisaran di China menjadi tombak awal pertukaran budaya serta agama Islam dan Buddha, dan menjadi awal kerja sama militer dan politik di sepanjang jalur sutra yang menghubungkan antara China, Asia Tengah, Eropa, dan Timur Tengah. Namun, Hubungan kedua negara ini merenggang pada abad pertengahan hingga berdirinya Dinasti Ottoman, hal ini dikarenakan karena faktor politik dunia islam yang saat itu dijunjung tinggi oleh Dinasti Ottoman. Sehingga, politik luar negeri Turki hanya berfokus kepada Timur Tengah dan Eropa.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 8, Number 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Hubungan diplomatik kedua negara kembali dibangun pada abad ke-20, dimana adanya perubahan geopolitik. Hubungan diplomatik secara resmi dibangun pada saat Turki memberikan pengakuan diplomatik atas Taiwan kepada China pada tahun 1971. Namun, saat itu hubungan kedua negara tersebut belum se-harmoni hubungan saat ini. Hal tersebut dikarenakan Turki masih condong ke Barat hingga resmi menjadi anggota NATO pada tahun 1952. Pengakuan diplomatik atas China yang diberikan oleh Turki juga dilandaskan karena Amerika Serikat mulai membuka hubungan kerja sama dengan China, hal ini membuat Turki mengubah sudut pandangnya terhadap China. Hubungan kedua negara mulai terjalin erat pada 1980-1990-an, tepatnya pasca perang dingin, kedua negara mulai memperkuat hubungan dagang dan diplomatik, alasan kedua negara sepakat untuk memperkuat hubungan dagang dan diplomatik yakni karena Turki melihat potensi investasi dan pasar besar di China.

Pada era 2000-an hubungan Turki dan China semakin erat, seiring dengan kekuatan ekonomi China di dunia yang semakin berkembang pesat. Pada era ini, China berinvestasi pada sektor sektor strategis di Turki, seperti membangun transportasi, infrastruktur, hingga sektor energi pembangkit listrik. Selain itu, meskipun Turki menjadi anggota dari NATO, Turki juga sesekali menjajaki kerja sama dengan China dalam bidang militer serta membangun kerja sama teknologi pertahanan dengan China. Selain itu, Turki juga terlibat kedalam misi besar China yakni menjadi negara yang terlibat sebagai negara anggota pada Belt Road Inititative (BRI) yang dicanangkan oleh China, Turki resmi menjadi negara anggota BRI pada tahun 2015. Pada era 2000-an ini, ketegangan hubungan diplomatik antara Turki dan China juga dimulai. Ketegangan disebabkan karena meningkatnya laporan resmi baik dari PBB maupun dari Organisasi Internasional lainnya terkait pelanggaran HAM atas etnis Uyghur di Xinjiang.

Major Issues For Turkey-China Relations

		TURKEY: Economy	TURKEY: Politics
CHINA	Economy	• Swap agreement creates financial connections. • Turkish economy benefits from banking loans (short term). • China increases its trade advantages (trade deficit favoring China).	• Turkey eases economic stress with Chinese money. • Turkish government delivers promised infrastructure projects (despite being more costly).
CHINA	Politics	• China increases its presence in Turkey. • China is stronger in the region. • China increases OBOR-related investments in Turkey.	• Turkey reduces its traditional support for the Uyghurs. • China develops political leverage and power in the region.

Source: Dr. Cüneyt Gürer

Tabulasi Gambaran Hubungan Turki dengan China
Sumber: Percorcodiam

Turki yang lahir dari nenek moyang yang sama dan telah menganggap etnis Uyghur sebagai "saudara sesuku", tentu tidak tinggal diam melihat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis Uyghur. Puncak ketegangan diplomatik antara kedua negara

*Corresponding author
E-mail addresses: adlanelathori51@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 8 No 6, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

dimulai pada tahun 2009, tepatnya usai kerusuhan yang terjadi di Urumqi, Presiden Erdogan menyampaikan pernyataan resmi yakni mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis Uyghur, dan menyebut bahwa tindakan penangkapan, pembunuhan, serta penahanan atas Uyghur merupakan tindakan genosida. Saat itu, Presiden Erdogan masih menjabat sebagai perdana menteri, adapun statementnya terkait isu Uyghur saat itu yakni "the incident in China is a genocide, there's no point in interpreting this otherwise"

Pada tahun 2010, Turki tidak memberikan respon apapun terhadap isu Uyghur. Hal ini disebabkan, karena Turki sedang menerapkan kebijakan "Zero Problem with the Neighbors". Kebijakan tersebut membuat Turki kerap menjalani hubungan yang baik diantara negara yang sedang berkonflik, meskipun sebelumnya Turki sangat lantang dalam membela salah satu pihak. Contohnya, seperti konflik Uyghur, yang awalnya pemerintah Turki sangat tegas terhadap China dalam menganggapi isu Uyghur ini, akan tetapi dengan adanya kebijakan ini membuat Turki kembali menjalankan hubungan yang erat dengan China. Kebijakan "Zero Problem with the Neighbors" dengan melihat kompleksitas permasalahan dan dinamika peristiwa yang terjadi baik di Kawasan maupun di luar Kawasan menuntut Turki untuk dapat merumuskan kembali strategi kebijakan luar negeri yang baru atau melakukan maneuver dan perubahan yang diperlukan, sehingga Turki dapat memainkan peran yang efektif dalam kegiatan membangun perdamaian atau kegiatan yang bermanfaat lainnya.

Hubungan antara Turki dan China yang semula mengalami ketegangan pasca kecaman keras dari Presiden Erdogan terkait isu Uyghur kepada pemerintah China, pada 2010 kembali membaik dengan ditandai adanya latihan militer bersama antara Turki dan China yang dilakukan di markas pasukan udara di Konya. Selain itu, kunjugan resmi perdana menteri China, Wen Jiabao yang melakukan kunjugan ke Turki pada 7 Oktober 2010. Kemudian di tahun yang sama, tepatnya beberapa setelah kunjugan perdana menteri Jiabao, Turki mengutus perwakilan Kementerian Luar Negeri Turki untuk melakukan kunjungan ke China, pembahasan yang diangkat pada pertemuan ini yakni Turki berencana untuk menambah kantor konsulat di China serta perkembangan investasi diantara kedua negara.

Pasca kunjungan kenegaraan tersebut, hubungan Turki dengan China terlihat semakin harmonis dan erat, Turki dan China terus meningkatkan hubungan di berbagai bidang strategis seperti ekonomi, pariwisata, transportasi, hingga perdagangan. Hubungan terlihat semakin erat sejak kunjungan Presiden Erdogan ke China pada 2012, kunjungan ini diketahui bertujuan untuk meningkatkan hubungan politik dan ekonomi antara kedua negara. Kunjungan ini menjadi kunjungan pertama Erdogan sebagai Presiden Turki, pertemuan ini fokus dalam membahas perdagangan dan pariwisata antara kedua negara, China merupakan mitra dagang terbesar ketiga Turki, Turki ingin terus meningkatkan volume bisnis dengan China. Serta, rekonsiliasi hubungan kedua negara pada 2010 juga memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah wisatawan China yang datang ke Turki. Jumlah wisatawan China yang berkunjung ke Turki, dikabarkan meningkat sebanyak 66 persen atau menembus angka 100.000 jiwa lebih untuk pertama kalinya pada tahun 2011. Tepatnya, setahun setelah kedua negara berupaya untuk memperbaiki hubungan diplomatiknya. Peningkatan wisatawan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2009, yang hanya mendatangkan kurang lebih 69.336 jiwa. Peningkatan wisatawan China ke Turki terus meningkat cukup signifikan setiap tahunnya, hal ini tentu memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara Turki sendiri.

Hingga pada tahun 2019, Turki kembali menyuarakan terkait isu Uyghur secara resmi, Turki mengatakan bahwa keadaan yang terjadi di Xinjiang merupakan tindakan pelanggaran HAM berat dan menekan pemerintah China untuk menutup kamp penahanan massal yang diberlakukan untuk etnis Uyghur, Turki juga mengatakan terkait banyaknya orang-orang Uyghur yang meninggal karena ditahan di kamp penahanan massal tersebut. Hal ini, tentu mengundang

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 8, Number 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

respon China, China meminta warganya yang melakukan perjalanan maupun yang berdiaspora ke Turki untuk berhati-hati. Pada tahun yang sama, hubungan Turki dengan Amerika Serikat pun dikabarkan memburuk, hal tersebut disebabkan karena Turki membeli sistem pertahanan S-400 dari Russia. Selain itu, ketegangan Turki dan Amerika juga terjadi karena dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap suku Kurdi di Suriah. Sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap Turki, juga turut memperburuk hubungan kedua negara. Pemberian sanksi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan dampak yang nyata, mendalam, serta sangat signifikan terhadap perkenomian Turki.

Permasalahan antara Turki dengan Amerika Serikat dianggap menjadi alasan utama Turki kembali menyuarakan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis minoritas Uyghur. Pernyataan terkait isu Uyghur yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah Turki, menjadi salah satu upaya Turki membangun kembali hubungan baik antara Turki dan Amerika Serikat. Kekhawatiran Turki terkait kemungkinan dikeluarkan dari NATO, yang akan memberikan dampak buruk bagi kedaulatan Turki juga membuat Turki terus melakukan berbagai upaya untuk kembali membangun hubungan baik dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

Namun, China juga terus berupaya untuk membangun citra positif di panggung internasional, dan menutup rapat terkait isu kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Uyghur di Xinjiang. Setelah respon resmi Turki yang mendesak China untuk menutup kamp penahanan massal tersebut, China memilih untuk melakukan *soft diplomacy* kepada Turki dalam merespon pernyataan tersebut, meskipun awalnya China meminta warga negaranya yang berada di Turki untuk berhati-hati. Sebulan setelah pernyataan dari Turki dikeluarkan, China menganugerahkan Turki sebagai "Destinasi Luar Negeri Terbaik" dalam Road Trip Festival 2019 yang di laksanakan di China. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah China, khususnya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata China untuk mempromosikan pariwisata Turki dan menarik banyak pengunjung dari warga negara China untuk melakukan perjalanan wisata ke Turki. Hal ini, dianggap sebagai salah satu upaya China untuk kembali membangun hubungan baik dengan Turki, dan mengalihkan perhatian Turki terhadap isu Uyghur, agar Turki tidak kembali aktif menyuarakan isu Uyghur.

Pasca penobatan Turki sebagai "Destinasi Luar Negeri Terbaik" yang diberikan oleh China membuat hubungan kedua negara semakin erat dan harmonis, bahkan Turki seakan melupakan tindakannya yang menuduh China pelaku pelanggaran HAM berat dan meminta China untuk menutup kamp penahanan massal, yang hanya diberlakukan untuk etnis minoritas Uyghur di Xinjiang. Turki dan China terus meningkatkan kerja sama dalam bidang-bidang strategis seperti sektor perdagangan, teknologi, infrastruktur, dan bahkan sektor perbankan. Turki memperlihatkan kembalinya hubungan yang harmonis dengan China dengan kunjungan Presiden Erdogan ke Beijing pada bulan Juli 2019, Presiden Erdogan juga mengatakan bahwa Turki dan China memiliki potensi yang besar untuk memperkuat kerja sama. Kunjungan tersebut dijadikan highlight di situs Kementerian Luar Negeri Turki sebagai Hubungan antara Turki dan Republik Rakyat Tiongkok.

Pada Tahun yang sama, China juga telah menyelamatkan Turki dari krisis ekonomi yang dialami oleh Turki saat itu, negara tersebut kehabisan cadangan devisa yang dapat digunakan untuk membayar hutangnya serta menurunkan tekanan krisis ekonomi di Turki. China menggerakkan Bank-Bank China yakni China Eximbank dan Bank lainnya untuk memberikan pinjaman untuk membiayai perdagangan antara China dan Turki. Hal tersebut, membuat perekonomian Turki bergerak secara signifikan, sehingga dapat terselamatkan dari krisis

*Corresponding author
E-mail addresses: adlanelathori51@gmail.com

ekonomi. China juga berinvestasi pada jalur kereta bawah laut Marmaray di Istanbul, proyek ini merupakan proyek investasi yang bertujuan untuk menghubungkan kota Asia dan Eropa di Turki.

Dengan limpahan bantuan ekonomi yang diberikan oleh China baik secara langsung maupun tidak langsung, membuat Turki semakin terikat dan bergantung dengan Negara Tirai Bambu tersebut. Hal ini, menyebabkan Turki semakin bungkam atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis Uyghur yang lahir dari nenek moyang yang sama dengan Turki. Meskipun Turki memberikan respon keprihatinannya atas laporan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) soal pelanggaran HAM di Xinjiang, namun sikap Turki terlihat bukan untuk membela etnis Uyghur secara penuh akan tetapi menjadi penengah dalam isu pelanggaran HAM yan terjadi di Xinjiang. Turki bahkan mengatakan harapannya untuk dapat melakukan kunjungan ke Daerah Otonomi Uyghur di Xinjiang atas undangan Beijing, untuk melihat secara langsung kondisi etnis Uyghur di Xinjiang. Turki terlihat sangat menjaga hubungan bilateral nya dengan China, meskipun Uyghur merupakan etnis yang terlahir dari nenek moyang yang sama, namun Turki tidak akan membiarkan persoalan eksternal apapun termasuk isu pelanggaran HAM di Xinjiang dapat merusak hubungan bilateral antara Turki dan China.

Hingga pada akhirnya, Turki mengadakan kunjungan kenegaraan ke Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang pada tahun 20204. Kunjungan ini merupakan upaya Turki untuk menunjukan dan menekankan solidaritas nya kepada etnis Uyghur, namun tetap membangun hubungan bilateral yang baik dengan China. Kali ini, Turki tidak mengancam China untuk dilaporkan ke PBB atau menekan pemerintah China melalui kecaman-kecaman atau pernyataan resmi yang diberikan oleh Turki. Hasil dari kunjungan ini, Turki memberikan pernyataan melalui beberapa wawancara media bahwa Turki tetap memberikan dukungan terhadap hak warga Uyghur untuk mendapatkan kewarganegaraan yang setara, namun Turki juga sangat menghormati dan menghargai kedaulatan dan integritas territorial China.

Turki dan China juga memperkuat kerja sama nya dalam mengatasi dan memerangi tindak kejahatan terrorisme dan ekstremisme di kedua negara tersebut, kerja sama ini dianggap sebagai hasil dari kunjungan Turki ke Xinjiang. Turki terlihat sangat mempercayai China, bahwa segala hal yang dilakukan oleh China di Xinjiang bukanlah untuk menindas atau melakukan pembersihan etnis terhadap Uyghur, akan tetapi hal itu merupakan upaya-upaya China untuk memerangi tindak kejahatan terrorisme dan separatisme di Xinjiang, dan kamp yan disebut sebagai kamp penahanan massal merupakan tempat re-edukasi nilai-nilai kenegaraan untuk etnis Uyghur yang dianggap telah terpapar ideologi terrorsime dan separatisme.

Meskipun sikap pemerintah Turki cenderung pragmatis terhadap isu Uyghur, demi menyeimbangi hubungan bilateral antara Turki dan China. Namun, masyarakat Turki terus menunjukan solidaritasnya terhadap etnis Uyghur dengan memberikan dukungan melalui aksi atau demonstrasi solidaritas untuk Uyghur, menyelenggarakan kegiatan seminar, dan melakukan kampanye terkait isu pelanggaran HAM yang terjadi terhadap etnis Uyghur di Xinjiang. Pemerintah Turki juga tetap mengizinkan komunitas Uyghur di Turki untuk menyelangarakan kegiatan untuk membangun hak-hak mereka, serta memberikan perlindungan secara umum sebagai pengungsi kepada mereka.

SIMPULAN

Terlahir dari nenek moyang yang sama, Turki memiliki ikatan sejarah dan budaya yang kuat terhadap etnis Uyghur. Hal ini, membuat Turki tergerak untuk menyuarakan hak-hak etnis Uyghur yang dianggap telah ditindas oleh pemerintah China. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Turki dalam membela hak-hak etnis Uyghur bervariatif, dengan memberikan dukungan secara langsung yakni membuka pintu untuk pengungsi-pengungsi dari Uyghur tinggal di Turki, dan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 8, Number 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

memberikan perlindungan yang umum sebagai pengungsi kepada etnis Uyghur di Turki. Turki juga memberikan kebebasan kepada etnis Uyghur di Turki untuk menyuarakan hak-hak mereka yang telah ditindas oleh pemerintah China, membiarkan mereka untuk membangun suatu komunitas atau organisasi tersendiri untuk menyuarakan hak-hak mereka. Turki juga telah mengeluarkan beberapa pernyataan dan kecaman secara resmi terkait isu Uyghur terhadap pemerintah China, dengan tujuan agar pemerintah China dapat menghentikan tindakan pelanggaran HAM terhadap etnis Uyghur.

Meskipun secara aktif menyuarakan dan memberikan dukungan resmi, Turki tetap sangat hati-hati dalam bertindak untuk menyuarakan dan memberikan dukungan terhadap etnis Uyghur. Turki berupaya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan China, dan tidak dapat dipungkiri bahwa China merupakan negara yang memiliki kekuatan ekonomi. Turki melakukan beberapa kerja sama dalam sektor-sektor strategis dengan China seperti infrastruktur, energi, transportasi, perbankan, dan bahkan pariwisata. Beberapa kali China menyelamatkan Turki dari krisis ekonomi. Terlebih lagi, China merupakan mitra dagang ke-3 Turki. Hal ini, membuat Turki semakin bergantung dalam perekonomian kepada China.

Dengan begitu, China juga diduga sering memanfaatkan situasi lemah Turki untuk melengahkan perhatian Turki terhadap etnis Uyghur. Sehingga, Turki tidak lagi menyuarakan perihal pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang. Selain itu, limpahan-limpahan bantuan ekonomi yang diberikan oleh China kepada Turki membuat Turki tidak lagi mengutamakan solidaritas terhadap Uyghur, akan tetapi lebih menjaga hubungan baik dengan China.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurehim Heyit. February 2019. Ministry of Foreign affairs of the Republic of Turkiye. https://www.mfa.gov.tr/sc_-06_-uygur-turklerine-yonelik-agir-insan-haklari-ihlalleri-ve-abdurrehim-heyit-in-vefati-hk.en.mfa. Diakses pada 1 Juli 2025.

Abrar, Nurul. Agus Fiadi. 2020. Sejarah dan Perkembangan Etnis Uyghur Dalam Mempertahankan Eksistensi Sebagai Satu Komunitas Muslim di Xinjiang Cina. Jurnal Sejarah Peradaban Islam. Volume 2 No. 1. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Aksoy, Hami. Hubungan antara Turki dan Republik Rakyat Tiongkok. Republic of Turkiye Ministry of Foreign Affairs. https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkiye-and-china.en.mfa diakses pada 2 Juli 2025

Angela, Tamara, Christian John De Fretes, Roberto Octavianus Cornelis Seba. 2025. Krisis Ekonomi Turki 2019- 2024 Studi Kasus: Sanksi AS dan Eropa terhadap Ekonomi Turki. Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana. Volume 4 No.1

Askerov Ali. 2017. Turkey's "Zero Problems with Neighbors" Policy: Was it Realistic?. Univeristy of North Carolina at Greensboro.

Aydogan, Merve. 2022. Turki prihatin dengan laporan PBB soal pelanggaran HAM pada etnis Uighur. https://www.aa.com.tr/id/politik/turki-prihatin-dengan-laporan-pbb-soal-pelanggaran-ham-pada-etnis-uighur/2680893. Diakses pada 2 Juli 2025

Baser, Gozdegul. 2018. Turkey's Tourist Profile: A Document Analaysis for Future Implications. Journal of Tourism and Hospitality Management. Vol.6 No.5.

Hakim, Moh. Fathoni, Denimah, Devy Febrian Arisandy Bahtiar, Muhammad Zulfikar Ramadhan, Feryan Airlangga, dan Stefano Jalu Sumbowo Putra. 2021. Nationality, Ethnicity, and Solidarity: Respon Turki atas Perundingan Etnis Uighur. Jurnal Hubungan Internasional UIN Sunan Ampel Surabaya. Tahun XIV, No.1.

*Corresponding author
E-mail addresses: adlanelathori51@gmail.com

Ghonimah, Syifa Nur dan Zulkarnain. 2020. Respon Turki Terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah China Kepada Etnis Uyghur di Xinjiang (2009 – 2015). Jurnal Universitas Nasional.

Hospita, Maria Elisa. 2019. China anugerahkan Turki sebagai "Destinasi Luar Negeri Terbaik". https://www.aa.com.tr/id/dunia/china-anugerahkan-turki-sebagai-destinasi-luar-negeri-terbaik-/1414658 Diakses pada 1 Juli 2025

Kostermans, Dyan. Ayhan Simsek. 2012. Kunjungan Erdogan ke China". https://www.dw.com/id/kunjungan-erdogan-ke-cina/a-15860732 Diakses pada 25 Juni 2025

Parlar Dal E. 2017. 'Belt and Road' project: China's new visiom and Turkey. Istanbul: Anadolu News Agency https://www.aa.com.tr/en/analysis-news/analysis-belt-and-road-project-chinas-new-vision-and-turkey/965994. Diakses pada 2 Juli 2025

Watson Ivan dan Helena De Moura. 2009. Turks criticize Chinese treatment of Uyghurs. http://edition.cnn.com/2009/WORLD/europe/07/11/turkey.china.uyghurs/ . Diakses pada 25 Juni 2025